

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Investasi

a) Definisi Investasi

Investasi atau penanaman modal merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara atau wilayah. Pada dasarnya, investasi merupakan satu pengeluaran demiter selenggaranya suatu kegiatan, yang pada akhirnya menghasilkan barang atau jasa. Bentuk dari pengeluaran tersebut dapat berupa pengeluaran dalam berbagai macam hal, seperti pengeluaran untuk pembangunan pabrik, pembelian tanah, pembelian mesin untuk produksi, dan berbagai macam bentuk pengeluaran lainnya (Suparmono, 2004).

Menurut Sunariyah (2003:4), investasi merupakan suatu penanaman modal yang memiliki jangka waktu yang lama dalam bentuk satu atau lebih aktiva. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan di masa depan. Sedangkan menurut Sadono (1997), investasi didefinisikan sebagai:

“Pengeluaran atau perbelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian”.

Pada ekonomi makro, investasi berarti pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan mendapatkan alat-alat

kapital yang baru. Sehingga dapat dikatakan bentuk investasi total yang dilakukan berupa pengadaan alat-alat baru sebagai pengganti dari pada alat yang lama atau yang sudah tidak ekonomis lagi untuk dipakai dan yang lainnya berupa pembelian alat-alat kapital yang baru untuk memperbesar stok kapital. Di sisi lain, investasi diartikan sebagai pengeluaran dari sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang atau jasa untuk menambah stok barang dan perluasan perusahaan. (Febriananda,2011) .

b) Penanaman Modal Asing (PMA)

Salim dan Budi (2008) menjelaskan penanaman modal asing sebagai transfer modal suatu negara ke negara lain. Tujuan pemindahan modal ini digunakan agar dapat menghasilkan keuntungan yang berada dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik itu total maupun sebagian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjelaskan bahwa :

“Pengertian penanaman modal dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut”.

Sedangkan definisi modal asing menurut undang – undang adalah sebagai berikut :

- 1) Modal asing diartikan sebagai media pembayaran luar negeri yang bukan termasuk bagian dari devisa negara, berdasarkan

persetujuan dari pemerintah Indonesia yang digunakan sebagai alat pembiayaan perusahaan yang ada .

- 2) Modal asing diartikan sebagai pegadaian alat-alat perusahaan, hal ini termasuk termasuk penemuan-penemuan yang dimiliki oleh orang asing, selama sumber pembiayaan alat-alatnya bukan dari kekayaan devisa negara.

Penanaman Modal Asing (PMA) bermula ketika modal yang berasal dari perusahaan asing ditanamkan ke sebuah perusahaan yang berada di dalam negeri. Oleh sebab itu perusahaan yang berada dinegara tujuan dapat dipengaruhi oleh perusahaan yang berasal dari negara asal investasi tersebut, baik pengaruhnya sebagian maupun keseluruhan. Negara penerima investasi asing akan menerima keuntungan antara lain adanya pembaharuan teknologi dari barang modal yang tidak dapat dicapai melalui investasi keuangan atau perdagangan barang dan jasa. Selain itu dengan adanya PMA dapat menjadi saranabagi pasar domestik untuk dapat dipromosikan. PMA juga melakukan pelatihan untuk karyawan sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan SDM di negara tujuan. Keuntungan yang dihasilkan oleh penanaman modal asing (PMA) juga memberikan kontribusi terhadap pajak pendapatan (Razin dan Sakda, 2002).

Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan dengan cara menyediakan dana, membentuk perusahaannya sendiri, hingga

menjalankan usahanya. Hal ini berbeda dengan investasi portofolio, di mana investor tidak hadir secara fisik.

c) Investasi Portofolio Asing

Investasi portofolio sendiri dapat diartikan sebagai investasi yang berbentuk aset-aset finansial, seperti saham dan obligasi yang didenominasikan dalam mata uang negara tujuan. Investasi portofolio ini dilakukan pada lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, dan lain sebagainya. Dalam investasi portofolio ini, dengan masuknya dana ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten) tidak menjamin adanya lapangan kerja baru yang dibuka. Walaupun dengan adanya emiten yang masuk dari pasar modal dengan tujuan memperluas usahanya, bukan berarti hal ini diikuti dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru. Banyak dana yang masuk ke emiten digunakan untuk membayar hutang ke bank, atau hanya untuk memperkuat struktur modal. Disamping itu, investasi portofolio ini tidak terjadi alih keterampilan manajemen dalam prosesnya, selain itu pada investasi portofolio alih teknologi tidak akan terjadi.

Dalam dunia investasi, resiko pasti akan dihadapi bagi setiap pemodal yang mana dalam hal ini adalah pemodal atau investor asing, yang diharapkan oleh pemodal atau investor ini adalah memperkirakan seberapa besar keuntungan yang didapat dan seberapa besar estimasi hasil yang tidak sesuai dengan yang

diharapkan. Setiap investor tentu saja tidak ingin mengalami kerugian, oleh karena itu dilakukan berbagai cara agar terhindar dari resiko kerugian.

Investasi portofolio bisa diartikan pula sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan resiko yang dapat kelak dapat diminimalisir dengan membagi modal yang ada pada jenis-jenis investasi tertentu.

2. Upah Minimum Regional

a) Definisi Upah Minimum Regional (UMR)

Menurut UU RI No.13/Th/2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Bab I Pasal 1 ayat 30 dijelaskan bahwa upah merupakan hak yang diperoleh pekerja/buruh dari perusahaan yang memberi pekerjaan dalam bentuk uang atas apa yang dikerjakan, dan dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dilakukan, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk uang tunjangan yang diberikan kepada para pekerja/buruh atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Sedangkan Upah Minimum Regional (UMR) diartikan sebagai upah minimum yang diizinkan untuk diberikan kepada pekerja oleh pengusaha, dan bersifat normatif. Besar-kecilnya penentuan UMR didasarkan pada kebutuhan hidup minimum, besarnya kesempatan kerja, indeks harga konsumen, kelangsungan perusahaan, upah yang berlaku dikawasan regional, dan tingkat

perkembangan ekonomi regional maupun nasional. (Kuncoro, 2002)

b) Hubungan Upah Minimum Regional (UMR) dengan PMA

Hubungan Penanaman Modal Asing PMA dengan Upah Minimum Regional (UMR) adalah dengan rendahnya upah dapat mendorong atau dapat meningkatkan daya tarik bagi investasi asing langsung, karena dengan rendahnya upah buruh akan dapat berdampak pada biaya produksi yang menurun, dan dengan menurunnya biaya produksi tentu saja dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Maka dengan rendahnya harga barang akan diikuti dengan permintaan di pasar yang terus meningkat (Rahayu, 2010).

3. Infrastruktur

a) **Definisi Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan komponen utama dalam mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur disini dapat didefinisikan sebagai sarana dalam menunjang kehidupan masyarakat baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, dalam bentuk fasilitas-fasilitas umum yang ada, seperti penyediaan sarana transportasi, ketersediaan listrik, pengairan, drainase, telekomunikasi, air bersih, serta fasilitas publik lainnya yang dapat menunjang masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dalam aspek sosial maupun ekonomi (Grigg, 1988).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) infrastruktur diartikan sebagai fasilitas publik, seperti jalan, jembatan, rumah sakit dan lain sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan berbentuk modal publik. Infrastruktur berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu infrastruktur ekonomi dan sosial (Familoni:2004). Infrastruktur ekonomi disini berperan penting sebagai pendorong kinerja dari pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu Negara.

Peningkatan infrastruktur juga dapat meningkatkan efisiensi dan dapat menghemat biaya yang dikeluarkan baik itu untuk kegiatan konsumsi maupun produksi. Oleh sebab itu, manfaat yang dapat dirasakan dari tersedianya akses jalan yaitu dapat maksimalnya pemanfaatan potensi daerah yang dimiliki. Di sisi lain, manfaat yang dapat dirasakan yaitu meningkatnya pendapatan bagi sektor-sektor yang memasok tenaga kerja, modal, dan bahan baku dari adanya pembangunan jalan. Dengan meningkatnya pendapatan dapat berdampak pada meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat, dan dengan meningkatnya daya beli masyarakat berarti aktivitas ekonomi yang lain, termasuk aktivitas investasi ikut meningkat.

b) Hubungan Infrastruktur dengan PMA

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara. Ada beberapa pertimbangan yang dapat mempengaruhi PMA, salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur, dimana infrastruktur mampu mempengaruhi cepat-lambatnya distribusi output kepada konsumen. tingkat ketersediaan infrastruktur disuatu negara merupakan faktor penting dan bahkan menjadi faktor penentu bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di negara tersebut. (Todaro, 2000)

Dengan baiknya infrastruktur, yang dalam penelitiannya dilihat dari jumlah tenaga listrik yang dihasilkan, proses produksi hingga distribusi kepada konsumen akan lebih cepat dan lebih efisien, karena dengan tersedianya energi listrik yang cukup maka penggunaan teknologi dalam hal distribusi dan produksi akan lebih maksimal. Apabila keadaan infrastruktur itu sendiri masih dalam proses perbaikan atau bahkan keadaan infrastruktur yang ada justru tidak baik, maka hal ini akan berdampak pada rendahnya daya saing dan menurunnya minat dari para investor asing, karena dengan lambatnya pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang ada akan berdampak pada terhambatnya proses ke tangan konsumen. Permana dan Alla (2010) mengatakan bahwa, suplai tenaga listrik dan infrastruktur sosial dapat memberikan pengaruh

yang besar terhadap minat investor untuk berinvestasi di suatu negara atau wilayah.

4. Jumlah Penduduk

a) Hubungan Jumlah Penduduk dengan PMA

Salah satu faktor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau wilayah adalah Pertumbuhan penduduk dan ketersediaan angkatan kerja. Dengan besarnya jumlah tenaga kerja yang tersedia berarti tingkat produksi akan ikut bertambah, sedangkan dengan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti pangsa pasar domestik yang tersedia pun lebih besar pula (Todaro, 2000). Semakin banyaknya permintaan investasi maka semakin banyak juga lapangan kerja yang dihasilkan sehingga berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja.

Seperti yang diketahui penduduk memiliki peranan yang penting dalam pembangunan yang ada di suatu wilayah atau negara. Asumsi klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh besar-kecilnya jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk merupakan indikator tersedianya pangsa pasar yang luas serta terjaminannya ketersediaan dari pada input faktor produksi. Namun besarnya jumlah penduduk dapat dikatakan sebagai faktor penghambat apabila besarnya jumlah penduduk tidak diikuti dengan kualitas pekerja nya yang memadai, hal ini menjadikan beban tersendiri khususnya bagi pemerintah dalam

melakukan pembangunan (Suparmoko, 2002). Tingginya jumlah penduduk yang ada di suatu negara dapat menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut, karena asumsinya dengan semakin tingginya jumlah penduduk yang ada, maka upah yang ditetapkan akan semakin murah.

Jumlah penduduk itu sendiri dapat menentukan tinggi-rendahnya investasi, tergantung pada jumlah angkatan kerja yang tersedia. Seperti yang diketahui angkatan kerja terdiri dari penduduk yang memiliki pekerjaan tetap namun sedang tidak bekerja untuk sementara waktu, dan penduduk yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk yang tidak dimasukkan ke dalam angkatan kerja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun baik itu yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencarinya ataupun tidak mencari pekerjaan disebabkan sedang berstatus sebagai seorang pelajar, serta penduduk yang kegiatannya atau pekerjaannya mengurus rumah tangga, pensiunan, atau secara fisik dan mental tidak lagi mampu untuk bekerja (Mantra, 2000).

Besarnya jumlah tenaga kerja yang tersedia dapat berarti jumlah tenaga kerja yang produktif ikut bertambah. Jadi dengan produktivitas tenaga kerja yang terus meningkat diharapkan dapat diikuti dengan jumlah produksi yang meningkat. Dalam perkembangan investasi yang ada Produktivitas tenaga kerja

dianggap memiliki peran yang sangat penting, khususnya investasi pada sektor industri. Dengan produktivitas yang tinggi, maka akan berdampak pada semakin baiknya perkembangan investasi, hal ini berlaku ketika tenaga kerja yang tersedia tidak begitu produktif maka akan berdampak pada tingginya biaya produksi dan hal ini dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

5. Indeks Kemahalan Konstruksi

a) Definisi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, tingginya tingkat harga yang berlaku di suatu daerah bergantung pada letak geografis daerah tersebut. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), didasarkan atas suatu pendekatan tertentu tergantung pada objeknya, misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model. Untuk mengetahui perbandingan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dapat dilakukan dengan dua metode penghitungan, yaitu dengan pendekatan input dan pendekatan harga output.

1. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing.

2. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi.

Selain menggunakan dua pendekatan diatas, alternatifnya yaitu dengan mengumpulkan harga konstruksi yang dapat mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja, tanpa memasukan biaya manajemen dan keuntungan kontraktornya. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan lain sebagainya. Apabila harga-harga komponen seperti diatas digabungkan, maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada diatas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah.

- b) Hubungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dengan PMA

Seperti yang diketahui Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, tingginya tingkat harga yang berlaku di suatu daerah bergantung pada letak geografis daerah tersebut, termasuk tingkat harga konstruksi. Apabila dikaitkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) kenaikan harga konstruksi ini akan berdampak pada menurunnya jumlah investasi asing (PMA), karena dengan meningkatnya harga konstruksi maka biaya produksi akan ikut meningkat pula, hal pun ini berlaku sebaliknya. Ketika harga konstruksi yang berlaku pada suatu daerah rendah maka hal ini

menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para investor menanamkan modalnya di wilayah tersebut karena biaya produksi yang rendah akan berdampak pada meningkatnya keuntungan yang didapat.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam studinya Asiedu (2002) menjelaskan dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* untuk studi kasus di negara Afrika dan menyimpulkan bahwa faktor penentu sebagian besar tingkat Penanaman Modal Asing (PMA) di Afrika ditentukan oleh keterbukaan terhadap perdagangan, pembangunan infrastruktur dan laba atas investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aritonang (2006) tentang kebijakan investasi sebagai bagian pembangunan nasional menyimpulkan bahwa salah satu kekurangan besar yang ada di Indonesia terutama dalam hal pembangunan ekonomi terletak pada terbatasnya infrastruktur yang ada, sehingga hal ini berdampak pada lemahnya faktor pendukung dari pada proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Infrastruktur tersebut bukan hanya dalam ruang lingkup ekonomi saja namun juga dalam ruang lingkup sosial.

Oleh sebab itu, sangat sulit mengharapakan setiap daerah yang ada di Indonesia mampu menerima dan mengelola dana investasi yang masuk dengan baik, karena dilihat dari ketersediaan fasilitas dapat dikatakan tidak menunjang. Disamping itu pembangunan infrastruktur juga membutuhkan

dana yang tidak sedikit, sehingga wajar saja apabila dana yang dimiliki oleh daerah hanya berfokus pada penyediaan fasilitas saja.

Penelitian lain yang menjelaskan tentang penanaman modal asing dilakukan oleh Kerr dan Peter (2001), dimana dalam studinya mereka mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi arus modal asing masuk ke China pada periode 1980-1998 Dengan menggunakan pendekatan *Error Correction Models (ECM)*, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat upah, kurs, tingkat suku bunga dan pajak yang dikenakan serta tingkat keterbukaan ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi PMA atau arus modal asing yang masuk ke China. Hasil penelitiannya menunjukkan hampir semua variabel yang diteliti memberikan pengaruh signifikan terhadap PMA kecuali variabel suku bunga.

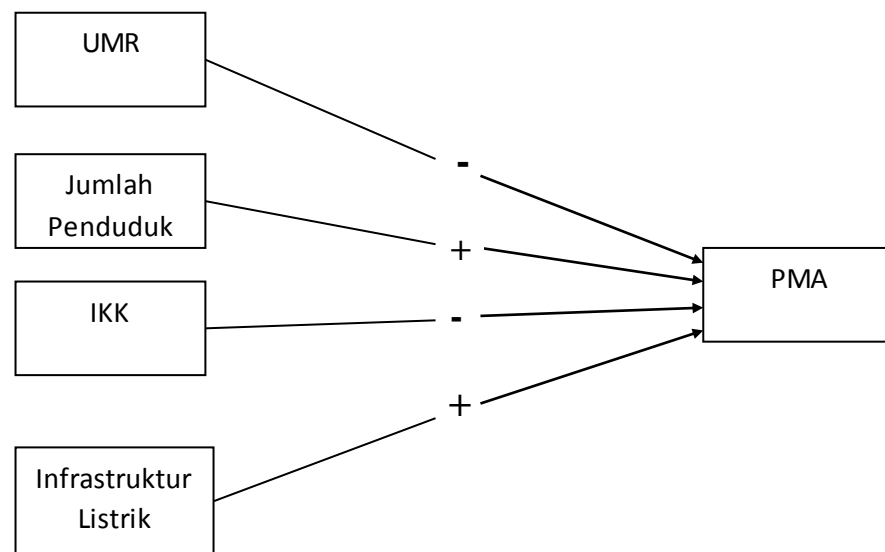
Khasanah (2009) dalam penelitiannya menggunakan analisis regresi linear berganda dan menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing (PMA) di Batam yaitu PDRB, upah, pajak. Sedangkan, tingkat inflasi dan KEK atau kawasan ekonomi khusus tidak berpengaruh terhadap PMA di Batam.

C. Kerangka Pemikiran

Penulis dapat menjelaskan variabel-variabel yang saling mempengaruhi dalam bentuk gambar kerangka berfikir. Dalam kerangka berfikir ini, variabel dependen yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan variabel Y. Upah minimum regional (UMR) sebagai variabel X_1 , jumlah penduduk sebagai variabel X_2 , Indeks Kemahalan Konstruksi

(IKK) sebagai variable X_3 , dan infrastruktur listrik sebagai variabel X_4 . Keempat variabel ini merupakan variabel independen yang mempengaruhi variable dependen.

Kerangka Konsep Penelitian



D. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga variabel Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di 33 provinsi yang ada di Indonesiatahun 2011-2015.
2. Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di 33 provinsi yang ada di Indonesiatahun 2011-2015.

3. Diduga variabel Indeks Kemahalan Konstruksi berpengaruh negatif terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di 33 provinsi yang ada di Indonesiatahun 2011-2015.
4. Diduga Infrastruktur listrik berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di 33 provinsi yang ada di Indonesia tahun 2011-2015.

